

PROSPEK KEBERLANJUTAN PROGRAM KAWASAN RUMAH PANGAN LESTARI

Sustainability Prospect of the Sustainable Food Reserved Garden Program

Saptana^{1*}, Kurnia Suci Indraningsih¹, Ashari¹, Maesti Mardiharini²

¹Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian

Jln. Tentara Pelajar No. 3B, Bogor, Jawa Barat 16111, Indonesia

²Balai Besar Pengkajian dan Pengembangan Teknologi Pertanian

Jln. Tentara Pelajar No.10, Bogor, Jawa Barat 16114, Indonesia

*Korespondensi penulis. Email: saptana.07@gmail.com

Naskah diterima: 8 April 2021

Direvisi: 28 Mei 2021

Disetujui terbit: 18 Juni 2021

ABSTRAK

Pemanfaatan lahan pekarangan yang dilakukan masyarakat dinilai belum optimal. Sebagai komponen dari upaya diversifikasi pangan, Kementerian Pertanian mengembangkan program Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL) yang merupakan kegiatan Kelompok Wanita Tani (KWT) di lahan pekarangan untuk menghasilkan aneka pangan bergizi untuk keluarganya secara berkelanjutan. Tujuan penelitian ini adalah melakukan evaluasi program KRPL yang mencakup aspek konsep kebijakan, implementasi, *output* dan *outcome*. Cakupan penelitian bersifat nasional, dengan pendalaman dilakukan di dua provinsi terpilih, yaitu Jawa Timur dan Kalimantan Barat. Pengumpulan data di kedua provinsi tersebut dilakukan dengan metoda dan wawancara terhadap 39 KWT. Analisis dilakukan secara diskriptif kualitatif dan analisis statistik dengan menggunakan *Partial Least Square* (PLS). Implementasi program KRPL menunjukkan kinerja sedang hingga baik. Meskipun demikian, jika tidak ada kebijakan dan program pendukung maka program KRPL terancam tidak berkelanjutan. Faktor-faktor yang paling berpengaruh terhadap keberhasilan program KRPL adalah (a) ketersediaan media tanam; (b) ketersediaan sumber air dan pemanfaatannya secara efisien; (c) adanya kelembagaan pasar (kios desa, pasar mini, pasar desa) dan kemitraan usaha (pedagang pengumpul, pedagang keliling); dan (d) pengolahan hasil yang dapat meningkatkan nilai tambah dan jejaring KRPL. Implikasi kebijakan untuk keberlanjutan program KRPL sangat ditentukan oleh aspek pelaksanaan, aspek pendukung, dan aspek promosi, serta sinergi antar program lintas sektor.

Kata kunci: *evaluasi program, keberlanjutan usaha pekarangan, rumah pangan lestari*

ABSTRACT

The use of backyard land (pekarangan) by community has not been optimal yet. As a component of food diversification effort, Ministry of Agriculture has developed a program called Sustainable Food-Reserved Garden (SFRG) that empowers Women Farmer Group (WFG) to be able to provide a diverse and nutritious food for their families continuously. The purpose of this study was to evaluate SFRG activities that include an assessment of policy concepts, implementation, output, and outcomes. Coverage of this study was at national level with indepth analysis was conducted in two selected provinces, namely East Java and West Kalimantan. Data collection in these two provinces used survey and interview to 39 WFGs. Data was analysed using descriptive and a statistical method using *Partial Least Square* (PLS). Results of this study showed that the SFRG program performances in the two provinces were mostly moderate to good. However, if there were no supporting policies and programs, the SFRG program was predicted will not be sustainable. Several factors affecting the sustainability of SFRG were (i) availability of planting media; (ii) availability of water sources and their efficient use; (iii) market institutions (mini markets, village markets) and business partnerships with collectors and supermarket; and (iv) processing of results that can increase value-added and SFRG networks. The policy implications for the sustainability of SFRG program are determined by the implementation aspects, supporting aspects, promotion aspects, and the synergy between programs across sectors.

Keywords: *food reserve garden, program evaluation, sustainable backyard farming*

PENDAHULUAN

Kementerian Pertanian sejak tahun 2011 mengembangkan konsep “Kawasan Rumah Pangan Lestari” (KRPL) yang diimplementasikan oleh Badan Penelitian dan Pengembangan (Balitbangtan) dengan tugas memberikan percontohan model KRPL berbasis teknologi inovatif dan Badan Ketahanan Pangan (BKP) diberi mandat untuk mengembangkannya di seluruh provinsi. Prinsip dari KRPL adalah dibangun dari kumpulan rumah tangga yang mampu mewujudkan kemandirian pangan melalui pemanfaatan lahan pekarangan, upaya diversifikasi pangan berbasis sumber daya lokal, pelestarian tanaman pangan, serta peningkatan kesejahteraan keluarga dan masyarakat. KRPL merupakan kegiatan yang dilaksanakan oleh Kelompok Wanita Tani (KWT) yang secara bersama-sama mengusahakan lahan pekarangan sebagai sumber pangan keluarga secara berkelanjutan.

Konsep Model Kawasan Rumah Pangan Lestari (M-KRPL) yang selanjutnya dilaksanakan dalam bentuk Program KRPL merupakan upaya pemberdayaan rumah tangga secara lestari dalam satu kawasan untuk dapat menyediakan pangan keluarga yang beragam, gizi seimbang dan aman, melalui pemanfaatan teknologi inovatif, serta melalui multi-aktivitas yang terintegrasi dengan berbagai kegiatan ekonomi kreatif (Balitbangtan 2013). Konsep KRPL sejalan dengan konsep pertanian keluarga, merupakan metode pengorganisasian produksi pertanian, kehutanan, perikanan, pengembalaan, dan akuakultur (perikanan darat) yang dikelola dan dikerjakan oleh keluarga dan sebagian besar bergantung pada tenaga kerja keluarga baik perempuan dan laki-laki yang merupakan basis produksi yang berkelanjutan (FAO 2014). Program KRPL dapat memanfaatkan lahan pekarangan, lahan tidur, dan lahan kosong, sebagai penghasil pangan untuk memenuhi pangan dan gizi keluarga. Program KRPL dilakukan melalui budidaya berbagai jenis tanaman, ternak, dan ikan sebagai tambahan untuk memenuhi ketersediaan pangan sumber karbohidrat, protein, vitamin, dan mineral.

Kegiatan optimalisasi pemanfaatan pekarangan melalui KRPL dilakukan dalam rangka mempercepat penganekaragaman pangan dan memperkuat ketahanan pangan masyarakat. Selain itu, program ini diarahkan untuk meningkatkan kesadaran, peran, dan partisipasi masyarakat dalam mewujudkan pola konsumsi pangan yang beragam, bergizi seimbang, dan aman (B2SA). Melalui kegiatan

ini, kemandirian pangan keluarga dan kelestarian lingkungan diharapkan dapat terwujud.

Berdasarkan hasil penelitian Balitbangtan, sebagaimana dilaporkan Mardiharini (2011) dikemukakan bahwa perhatian petani terhadap lahan pekarangan masih terbatas. Penyebabnya adalah keluarga petani lebih memilih memberikan perhatian terhadap lahan sawah dan lahan kering yang dimiliki karena dipandang lebih menguntungkan. Akibatnya, berbagai inovasi pengembangan terkait pemanfaatan lahan pekarangan belum mencapai sasaran yang diharapkan. Lahan pekarangan memiliki potensi dalam penyediaan bahan pangan keluarga, mengurangi pengeluaran untuk pembelian pangan dan meningkatkan pendapatan rumah tangga petani (Ashari et al. 2012). Salah satu cara yang dapat dilakukan adalah merubah struktur pekarangan yang telah ada (pola pekarangan tradisional) ke arah struktur penggunaan lahan pekarangan model baru (pola pekarangan model).

Salah satu tantangan pembangunan pertanian dewasa ini adalah permintaan dunia dan domestik terhadap produk pangan ke depan masih terus meningkat. Namun sayangnya, hal ini belum diimbangi dengan peningkatan produksinya (Mudrieq 2013). Pengembangan KRPL diharapkan sedikit banyak dapat membantu peningkatan bahan baku hasil pertanian dengan pengembangan aneka umbi lokal, sayuran, buahan, serta ternak dan ikan (Saptana et al. 2013). Selanjutnya dikemukakan bahwa Program KRPL dapat mendukung pelestarian lingkungan, menyerap tenaga kerja terutama tenaga kerja perempuan dan kelompok milenial, dan meningkatkan peluang berusaha. Lebih lanjut, diungkapkan bahwa dengan ketidakpastian harga produk pertanian maka pengembangan KRPL diharapkan dapat membantu stabilisasi harga beberapa bahan kebutuhan pokok.

Peningkatan pendapatan masyarakat melalui pemanfaatan lahan pekarangan diharapkan dapat meningkatkan daya beli masyarakat. Pengembangan KRPL khususnya untuk komoditas umbi lokal, sayuran, buahan, serta ternak dan ikan diharapkan dapat memenuhi kebutuhan keluarga dan dalam batas-batas tertentu dapat mengurangi permintaan bagi produk impor. Rentang waktu implementasi program KRPL yang relatif lama memunculkan pertanyaan, apakah perencanaan dan realisasi berjalan dengan baik? Apakah diperlukan perbaikan dalam pelaksanaan ke depan agar berkelanjutan? Berdasarkan permasalahan tersebut, topik ini dinilai penting untuk diangkat

untuk untuk merumuskan langkah-langkah penyempurnaan.

Secara umum, tujuan penelitian ini adalah melakukan evaluasi Program KRPL yang mencakup konsep kebijakan, implementasi, *output*, dan *outcome*. Secara spesifik, tujuan penelitian ini adalah mengkaji program KRPL mengenai: (1) kesesuaian disain program di lapangan; (2) faktor-faktor yang memengaruhi keberhasilan; (3) kendala dalam pelaksanaannya; dan (4) prospek dan keberkelanjutan program.

METODOLOGI

Kerangka Pemikiran

Pemanfaatan lahan pekarangan sudah membudaya di kalangan masyarakat Indonesia, khususnya di pedesaan Jawa. Lahan pekarangan biasanya ditanami dengan aneka jenis tanaman bunga, sayuran, buah, aneka umbi, serta tanaman tahunan. Bahkan, kebiasaan ini terus dipertahankan saat mereka berpindah tempat tinggal, misalnya menjadi transmigran di luar Pulau Jawa. Selain faktor kebiasaan yang sudah turun temurun, faktor lain yang memengaruhi secara positif pada pemanfaatan lahan pekarangan adalah pengetahuan, ketersediaan lahan pekarangan, dan ketersediaan waktu luang (Sukanata et al. 2015).

Peran pihak luar dalam bentuk intervensi program melalui pendampingan atau penyuluhan serta faktor lingkungan dapat mendorong terjadinya pemanfaatan lahan pekarangan secara lebih intensif, seperti pada kasus yang terjadi di Kelurahan Pasir Putih, Kota Depok (Farahdiba et al. 2020). Dalam pelaksanaan kegiatan penyuluhan, terungkap bahwa materi penyuluhan yang berpengaruh terhadap pemanfaatan lahan pekarangan adalah tipe atau pola pemanfaatan pekarangan, budidaya sayuran, dan kegiatan penyuluhan yang diintegrasikan dengan petak percontohan. Salah satu contoh upaya pemanfaatan lahan pekarangan yang berhasil adalah M-KRPL yang dilaksanakan KWT di Desa Kayen, Kecamatan Kota Pacitan, Jawa Timur Tahun 2011. Model ini telah direplikasi di berbagai provinsi melalui berbagai tahapan mulai persiapan sampai pelaksanaan dengan melibatkan semua pihak terkait serta pendampingan teknologi dari Balitbangtan.

Program KRPL ini merupakan salah satu upaya untuk mewujudkan kemandirian pangan

melalui diversifikasi pangan, kelestarian sumber daya lokal, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Program KRPL ini tidak hanya membidik sasaran rumah tangga, tetapi juga ditujukan pada tingkat kawasan. Selain pengembangan melalui KWT, juga dilakukan pengembangan melalui kebun-kebun sekolah, kebun-kebun desa, dan kebun-kebun perkantoran. Keberlanjutan program juga menjadi salah satu perhatian dari program KRPL dengan diintroduksikannya Kebun Bibit Desa (KBD) dan ketersediaan media tanaman.

Implementasi program KRPL tidak selalu berjalan sesuai dengan yang direncanakan, baik disebabkan faktor-faktor yang melekat pada konsep program, implementasi program, maupun tingkat partisipasi kelompok penerima manfaat. Oleh karena itu, evaluasi terhadap program perlu dilakukan, baik ketika program sedang dalam proses untuk segera dapat memperbaiki kekurangan dan mengatasi masalah yang ada; atau setelah program selesai untuk melihat *output* (*output*), hasil (*outcome*), dan dampak (*impact*), serta keberlanjutan program.

Secara harfiah, evaluasi adalah penilaian sistematis tentang suatu objek. Sementara, program adalah panduan terencana dari aktivitas dan sumberdaya untuk mencapai tujuan tertentu dalam kurun waktu dan anggaran biaya tertentu (Bappenas 2012). Evaluasi program adalah penilaian sistematis terhadap suatu program melalui hasil-hasil pelaksanaan kegiatan-kegiatan dari masing-masing program tersebut. Kinerja (*performance*) mempunyai makna lebih luas, bukan hanya menyatakan sebagai hasil kerja, tetapi juga bagaimana proses kerja tersebut berlangsung (Widayanti 2015). Dengan demikian, kinerja adalah apa yang dikerjakan dan bagaimana proses mengerjakannya. Kinerja merupakan hasil pekerjaan yang mempunyai hubungan yang kuat dengan tujuan strategis yang akan dicapai. Sebagai suatu penilaian sistematis, evaluasi program harus memenuhi beberapa syarat pokok, yaitu: mengacu pada kaidah yang berlaku, dilakukan secara sistematis, teridentifikasi penentu keberhasilan dan kebelumhasilan program, menggunakan tolok ukur baku, dan hasil evaluasi dapat digunakan sebagai tindak lanjut atau pengambilan keputusan (Munthe 2015). Program KRPL sudah berjalan dari tahun 2012 hingga 2018, sehingga dipandang perlu melakukan evaluasi menyeluruh dan holistik terhadap Program KRPL. Evaluasi juga diperlukan untuk membuktikan keberhasilan atau perlunya perbaikan dalam pelaksanaan Program KRPL.

Lokasi dan Waktu Penelitian serta Pemilihan Responden

Evaluasi program KRPL dilakukan untuk lingkup nasional. Kajian mendalam sebagai bagian untuk menjelaskan keadaan di lapangan dilakukan di dua Provinsi, yaitu Jawa Timur dan Kalimantan Barat. Waktu pengumpulan data dilaksanakan pada bulan Mei – Juni 2019. Evaluasi dilakukan terhadap data dan informasi capaian kinerja, dokumen juknis/juklak, dan laporan-laporan yang tersedia.

Kegiatan evaluasi Program KRPL dilakukan dengan menganalisis atas data, informasi, dan dokumen pelaksanaan program 2014 – 2018 dan perencanaan tahun 2019, dan evaluasi kinerja pelaksanaan KRPL oleh Kelompok Wanita Tani (KWT) di lokasi contoh penelitian. Terdapat 34 provinsi penerima program meliputi 2.851 desa (tahun 2015), 1.973 desa (2016), dan 1.690 desa (2017), dan 2.300 desa (2018). Dua provinsi dijadikan lokasi contoh penelitian yang diambil secara sengaja (*purposif*) yaitu Provinsi Jawa Timur dan Kalimantan Barat; unit responden contoh pada penelitian ini adalah kelembagaan KWT dengan rata-rata anggota kelompok bervariasi antara 20 – 40 orang.

Provinsi Jawa Timur mewakili wilayah Pulau Jawa dan Kalimantan Barat mewakili Luar Jawa. Masing-masing provinsi tersebut dipilih dua kabupaten yang dapat menunjukkan keberagaman hasil pelaksanaan KRPL selama ini (periode 2015 – 2019). Di setiap kabupaten, dipilih KWT pelaksana KRPL sebagai responden

contoh (*sample*) yang mewakili setiap periode tahun, dan mewakili KWT yang mendapat penilaian baik, serta KWT yang relatif kurang baik. Pemilihan lokasi tersebut atas dasar hasil diskusi tim evaluator bersama para pelaksana KRPL di Dinas Ketahanan Pangan kabupaten terpilih. Distribusi lokasi dan responden contoh disajikan pada Tabel 1.

Evaluasi Kinerja Program

Kajian difokuskan pada: (a) evaluasi terhadap kinerja perencanaan dan implementasi Program KRPL; (b) identifikasi kendala-kendala yang dihadapi, faktor-faktor yang memengaruhi keberhasilan dan keberlanjutan program, serta prospek dan keberlanjutan program; dan (c) pumusan rekomendasi kebijakan terkait penyempurnaan Program KRPL yang berkelanjutan. Kajian dilakukan secara deskriptif kualitatif. Menurut Abdullah (2015), penelitian deskriptif dilakukan dengan memeriksa sebab-sebab dari suatu gejala atau fenomena tertentu. Secara operasional, metode analisis deskriptif dilakukan dengan cara mengumpulkan data-data sesuai dengan yang fakta sebenarnya kemudian data tersebut disusun, diolah, dan dinalisis untuk dapat memberikan gambaran mengenai masalah yang ada sehingga penyempurnaan program dapat dilakukan.

Terdapat banyak model evaluasi program atau kegiatan yang digunakan para ahli. Salah satu model evaluasi yang banyak digunakan dalam berbagai bidang tercakup pembangunan

Tabel 1. Lokasi pelaksanaan evaluasi Program KRPL, tahun 2019

No.	Responden	Jawa Timur		Kalimantan Barat		Jumlah
		Kabupaten Malang	Kabupaten Mojokerto	Kota Singkawang	Kota Pontianak	
1.	BKP Provinsi	1	-	1	-	2
2.	Dinas Ketahanan Pangan/ Penyuluhan kabupaten	1	1	1	1	4
3.	Dinas Pertanian Kabupaten	1	1	1	1	4
4.	UPTD/PPL pendamping	1	1	1	1	4
5.	KWT	7	6	5	6	23
	2015	1	2	2	2	7
	2016	2	-	-	-	2
	2017	-	2	-	2	4
	2018	3	1	2	1	7
	2019	1	1	1	1	4
	Total	11	10	9	9	39

pertanian adalah model CIPP (*Context – input – process – product*) (Zhang et al. 2011; Umam dan Sarifah 2018; Setiasih et al. 2020). Model CIPP melihat kepada empat dimensi, yaitu: dimensi konteks, dimensi input, dimensi proses dan dimensi produk. Keunikan model ini adalah pada setiap tipe evaluasi terkait pada perangkat pengambil keputusan (*decission*) yang menyangkut perencanaan dan operasional sebuah program. Keunggulan model CIPP memberikan suatu format evaluasi yang komprehensif pada setiap tahapan evaluasi suatu program.

Model evaluasi CIPP merupakan suatu kerangka pikir yang komprehensif untuk melakukan evaluasi formatif dan sumatif suatu program, personil, produk, organisasi, atau suatu sistem (Zhang et al. 2011; Refita et al. 2017). Model evaluasi ini menekankan "*learning by doing*" untuk mengidentifikasi koreksi sebuah program yang bermasalah. Refita et al. (2017) mengemukakan model evaluasi CIPP menekankan bahwa prinsip yang paling mendasar adalah bukan untuk pemecahan masalah tetapi lebih untuk penyempurnaan program.

Evaluasi konteks, input, proses, dan produk pada model evaluasi CIPP diuraikan Stufflebeam (2003) sebagai berikut. Evaluasi konteks merupakan fokus institusi yang mengidentifikasi peluang dan menilai kebutuhan. Oleh karena itu, dalam evaluasi konteks hal yang harus dilakukan adalah memberikan gambaran dan rincian terhadap lingkungan, kebutuhan, dan tujuan suatu program. Evaluasi input adalah evaluasi yang bertujuan menyediakan informasi untuk menentukan bagaimana menggunakan sumber daya yang tersedia dalam mencapai tujuan program. Evaluasi proses diarahkan pada sejauh mana kegiatan yang direncanakan tersebut sudah dilaksanakan sesuai dengan yang direncanakan dan dapat memberikan umpan balik bagi pihak manajemen pelaksana program tersebut. Sementara itu, evaluasi produk bertujuan mengukur dan menginterpretasikan capaian-capaian program berupa keluaran (*output*) dan hasil (*outcome*).

Dalam evaluasi ini ditambahkan evaluasi dampak (*impact*) Program KRPL. Tujuannya untuk melihat dampak Program KRPL, baik yang bersifat positif maupun negatif. Evaluasi dampak (*impact*) Program KRPL adalah untuk peningkatan Pola Pangan Harapan (PPH) dan pola konsumsi pangan Bergizi Beragam Seimbang dan Aman (B2SA). Ke depan, dampak lebih lanjut dari Program KRPL diharapkan dapat meningkatkan perkembangan ekonomi wilayah perdesaan.

Analisis Kendala, Faktor Penentu, Prospek, dan Keberlanjutan Program

Analisis kendala Program KRPL dilakukan dengan mengidentifikasi kendala-kendala pokok, baik yang bersifat teknis, ekonomi, sosial-kelembagaan, serta aspek kebijakan pendukung. Analisis faktor-faktor yang memengaruhi keberhasilan Program KRPL dilakukan melalui diskusi dengan pengambil kebijakan di daerah, baik di tingkat provinsi, kabupaten/kota, maupun FGD di KWT dengan melibatkan pendamping Program KRPL kabupaten dan kelompok, serta tokoh masyarakat setempat (*local champion*).

Analisis prospek dan keberlanjutan Program KRPL dilakukan melalui identifikasi faktor-faktor yang memengaruhi keberhasilan program, kendala-kendala pokok, baik yang bersifat teknis, ekonomi, dan sosial atau kelembagaan. Langkah selanjutnya adalah melakukan identifikasi faktor-faktor yang paling berpengaruh terhadap keberhasilan Program KRPL.

Untuk melihat contoh model pengembangan KRPL yang berhasil dan berkelanjutan, maka dilakukan analisis terhadap faktor-faktor, sebagai berikut: (a) ketersediaan dan efektivitas pengelolaan Kebun Bibit Desa (KBD); (b) infrastruktur pendukung terkait Program KRPL; (c) peran tokoh masyarakat (*local champion*); (d) dukungan pemerintah daerah dan pemerintah desa; (e) ketersediaan kelembagaan pasar *input* (benih, pupuk, obat-obatan, alat dan mesin pertanian, tenaga kerja, pembiayaan) dan *ouput* dari hasil produk KRPL, (f) pilihan jenis komoditas dan sistem rotasi tanaman yang tepat, (g) kapasitas SDM pengelola dan tingkat partisipasi anggota.

Analisis data untuk menjawab tujuan empat adalah PLS, yaitu analisis statistik yang mirip dengan *Structural Equation Model* (SEM) dalam analisis *covariance*. Kerangka dasar PLS yang digunakan berbasis regresi linear. Seperti halnya SEM, PLS juga untuk memeriksa dan membenarkan model hipotetis yang dibangun berdasarkan teori dan menjelaskan fenomena yang dikaji berdasarkan model yang fit. Mattjik dan Sumertajaya (2011) mendefinisikan model struktural sebagai struktur hubungan yang membentuk atau menjelaskan kausalitas antarfaktor. PLS juga merupakan pendekatan terintegrasi antara analisis data dengan konstruksi konsep dengan tujuan untuk mengetahui besarnya peubah bebas (*independen variable*) dapat menjelaskan keragaman total peubah terikat (*dependen variable*), serta melihat pengaruh peubah bebas terhadap peubah terikat.

Ada tujuh variabel laten eksogen (ξ) dalam kajian ini, yaitu: (1) pengadaan benih/bibit di KBD; (2) sarana dan prasarana (air, media tanam, pupuk); (3) keragaman jenis tanaman dan rotasi tanaman; (4) dukungan tokoh masyarakat (*local champion*); (5) partisipasi aktif dari anggota KWT dan masyarakat sekitar; (6) kegiatan pendampingan dan dukungan pemda; dan (7) kelembagaan pasar dan pengolahan hasil. Ketujuh variabel laten eksogen tersebut diduga memengaruhi keberlanjutan dan kemandirian KRPL sebagai variabel endogen (η). Teknik PLS dapat mencari dekomposisi linear dari kedua variabel tersebut (Irwan dan Adam 2015), sehingga rumusnya dapat diformulasikan sebagai berikut:

$$\begin{aligned}x &= \Lambda x \xi + \delta \\y &= \Lambda y \eta + \varepsilon\end{aligned}$$

dimana:

- x dan y : indikator untuk variabel laten eksogen (ξ) dan endogen (η)
- Λx dan Λy : matriks *loading*
- δ dan ε : kesalahan pengukuran atau *noise*.

Persamaan model indikator formatif, sebagai berikut:

$$\begin{aligned}\xi &= \Pi_{\xi} X_i + \delta \\ \eta &= \Pi_{\eta} Y_i + \varepsilon\end{aligned}$$

dimana:

- ξ , η , X, dan Y: sama dengan persamaan sebelumnya.
- Π_{ξ} dan Π_{η} : koefisien regresi berganda dari variabel laten terhadap indikator,
- δ dan ε : residual dari regresi.

Model PLS untuk *outer model* :

(a) Variabel latent eksogen 1 (reflektif):

$$\begin{aligned}x_1 &= \lambda_{x1} \xi_1 + \delta_1 \\ x_2 &= \lambda_{x2} \xi_1 + \delta_2 \\ x_3 &= \lambda_{x3} \xi_1 + \delta_3\end{aligned}$$

(b) Variabel latent eksogen 2 (formatif)

$$\xi_2 = \lambda_{x4} X_4 + \lambda_{x5} X_5 + \lambda_{x6} X_6 + \delta_4$$

(c) Variabel latent endogen (reflektif)

$$\begin{aligned}y_1 &= \lambda_{y1} \eta_1 + \varepsilon_1 \\ y_2 &= \lambda_{y2} \eta_1 + \varepsilon_2\end{aligned}$$

Persamaan untuk *inner model*:

$$\eta = \beta \eta + \Gamma \xi + \varsigma$$

Analisis PLS ini menggunakan software SMART PLS, yang mempunyai kemampuan mengolah data untuk model SEM formatif ataupun reflektif dengan jumlah "n" responden terbatas 30-100 (jumlah n dalam kajian ini sebanyak 39 responden).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kinerja Program KRPL

Tahap persiapan Program KRPL termasuk dalam kategori kinerja baik, artinya sesuai dengan pedoman teknis atau petunjuk pelaksanaan. Mulai dari penetapan CPCL (Calon Petani dan Calon Lokasi), pendamping kabupaten/kota, pendamping kelompok, sosialisasi kegiatan, penyusunan RUK/RKKA (Rencana Usaha Kegiatan dan Kebutuhan Anggaran) sesuai dengan paket program yang diterima KWT. Artinya, terdapat kesesuaian antara kegiatan yang direncanakan dengan yang diterima kelompok sasaran.

Ketersediaan bibit kelompok di KBD untuk keberlanjutan program KRPL menunjukkan kinerja yang tergolong baik. Secara umum, bibit tersedia di kebun bibit dan dapat dimanfaatkan oleh anggota kelompok dan masyarakat sekitar, bahkan di beberapa daerah tersedia sepanjang tahun. Secara umum, kebun bibit kelompok sudah memenuhi persyaratan dalam hal kelayakan lahan yang digunakan, aspek lokasi strategis kebun bibit, keragaman jenis tanaman, jumlah tanaman tersedia, kelembagaan pengelola berjalan baik, sedangkan infrastruktur pendukung memiliki kinerja pada tingkat sedang. Beberapa lokasi dan kondisi musim kemarau (MK) kesulitan mendapatkan air untuk menyiram tanaman.

Demonstrasi plot (Demplot) kelompok sudah cukup berfungsi dengan baik. Hal ini diindikasikan demplot kelompok sudah memenuhi empat aspek, yaitu: (a) fungsi demplot sebagai lokasi percontohan bagi anggota kelompok dan masyarakat sekitar; (b) kegiatan temu lapang dilakukan secara rutin untuk melakukan kegiatan bimbingan teknis di lapang; (c) tempat saling belajar di antara anggota dengan bimbingan teknis tenaga pendamping kelompok dan kabupaten; dan (d) tempat kegiatan praktik lapang untuk melakukan kegiatan budidaya berbagai tanaman khususnya sayuran.

Peran pendamping kabupaten dan kelompok sangat penting dalam dinamisasi kegiatan KWT melalui kegiatan penyuluhan, bimbingan teknis, dan pelatihan-pelatihan melalui praktik langsung di lapang. Para pendamping mempunyai kemampuan dengan kinerja baik dalam hal mengidentifikasi dan memecahkan masalah yang dihadapi anggota kelompok. Pendamping kelompok adalah penyuluh Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang sudah berpengalaman, penyuluh tenaga harian lepas (THL), dan penyuluh

swadaya. Secara empiris, frekuensi kunjungan tenaga pendamping ke kelompok binaan belum sesuai yang diharapkan, karena terbatasnya jumlah dan beragamnya tugas PPL.

Output Program KRPL yang ditunjukkan, realisasi jumlah kelompok terhadap jumlah yang ditargetkan tergolong sangat tinggi berkisar, antara 98,51% pada tahun 2015 hingga 99,96% pada tahun 2018. Jumlah kelompok yang melaksanakan Program KRPL tahun 2015 – 2018 semakin meningkat dari waktu ke waktu. Pada tingkat provinsi, realisasi anggaran Program KRPL pada tahun 2015 rata-rata sebesar 95,39%, meningkat menjadi rata-rata 99,59% pada tahun 2018. Peningkatan realisasi tersebut disebabkan peningkatan jumlah anggaran, ketepatan dalam seleksi calon petani/calon lahan (CP/CL), peningkatan kinerja pendampingan, partisipasi kelompok, dan ketepatan waktu dalam pencairan anggaran.

Jumlah anggaran sebesar Rp50 juta per kelompok untuk penumbuhan dan Rp15 juta untuk pengembangan dipandang sudah cukup memadai. Namun demikian, jumlah tersebut perlu disesuaikan dengan kenaikan harga-harga barang umum (inflasi), sehingga kegiatan penumbuhan dan pengembangan Program KRPL yang baru tidak mengalami penurunan kualitas. Jika dana yang dialokasikan tetap, maka tahapan yang dipandang tepat adalah tahap I (penumbuhan) Rp30 juta, tahap II (pengembangan) Rp20 juta, dan tahap III (pemanfaatan) Rp15 juta.

Indikator output dari Program KRPL adalah jumlah KRPL dan anggota KWT peserta yang dikembangkan tahun 2015 – 2018. Jumlah KRPL yang dikembangkan tahun 2015 – 2018 menunjukkan beberapa hal pokok, sebagai berikut: (1) jumlah kelompok penerima manfaat yang menjadi target tertinggi pada tahun 2016 sebesar 4.885 kelompok dan terendah pada tahun 2017 hanya sebesar 1.691 kelompok; dan (2) realisasi tertinggi dicapai pada tahun 2018 mencapai 99,96% dan terendah pada tahun 2015 sebesar 98,51%.

Hal ini didukung hasil penelitian Syam et al. (2018) yang menunjukkan bahwa kegiatan KRPL memiliki nilai tambah ekonomi berupa aktivitas menjual hasil panen berupa buah dan sayur organik kepada masyarakat. Pemanfaatan lahan pekarangan untuk tempat penanaman sejumlah tanaman buah dan sayur untuk dikonsumsi keluarga. Namun pada kenyataannya, ketika kebutuhan konsumsi keluarga sudah terpenuhi, maka anggota dapat menjualnya kepada masyarakat sekitar atau melalui pedagang keliling. Pendapatan tambahan ini diakui sebagai

nilai tambah ekonomi karena pada saat anggota belum melaksanakan program KRPL, mereka tidak memiliki sumber pendapatan karena anggota KRPL adalah ibu rumah tangga. Pendapatan tambahan yang diterima oleh anggota kelompok wanita tani diakui mampu memperkuat ekonomi keluarga sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan keluarga.

Hasil produksi lahan pekarangan anggota kelompok dapat memenuhi sebagian besar kebutuhan pangan dan gizi keluarga sehingga mampu mengurangi pengeluaran rumah tangga, bahkan untuk beberapa kasus anggota KWT di lokasi Jawa Timur sebagian hasil sudah dapat menambah pendapatan keluarga. Hasil kajian empiris di beberapa daerah, pelaksana program KRPL menunjukkan bahwa anggota KWT telah melakukan pengolahan pangan hasil produksi dari pekarangan, seperti keripik singkong, keripik pisang, keripik talas, *stick* ubijalar, aneka kue kering, dan aneka manisan (Saptana et al. 2013; Sirnawati et al. 2015). Sementara itu, di lokasi penelitian di Kalimantan Barat, sebagian besar masih dikonsumsi dalam bentuk pangan segar untuk memenuhi kebutuhan pangan dan gizi keluarga.

Hasil evaluasi kinerja hasil (*outcome*), sebagai berikut: (1) frekuensi konsumsi sayuran agregat provinsi meningkat 10 – 15% di Jawa Timur dan 10 – 45% di Kalimantan Barat; (2) frekuensi konsumsi buah agregat provinsi meningkat 3 – 5% di Jawa Timur dan 0 – 10% di Kalimantan Barat; (3) frekuensi konsumsi protein hewani agregat provinsi meningkat 5 – 8% di Jawa Timur dan 0 – 10% di Kalimantan Barat; (4) penghematan pengeluaran agregat provinsi baik di Jawa Timur maupun Kalimantan Barat sekitar 10 – 15%; dan (5) peningkatan pendapatan agregat rumah tangga sebesar 5 – 12,5% di Jawa Timur dan <5% di Kalimantan Barat. Peran komoditas sayuran cukup dominan baik di Jawa Timur maupun di Kalimantan Barat.

Berdasarkan hasil analisis evaluasi program KRPL diperoleh temuan bahwa manfaat Program KRPL: (1) skor PPH di Provinsi Jawa Timur dan Kalimantan Barat meningkat, masing-masing dari 86,4 menjadi 89,7 di Jawa Timur dan dari 81,4 menjadi 82,9; dan (2) kesadaran terhadap pentingnya pola konsumsi pangan yang Bergizi Beragam Seimbang Aman (B2SA) di Jawa Timur maupun Kalimantan Barat meningkat pada tingkat sedang.

Evaluasi Kinerja Kegiatan KRPL

Penilaian terhadap aktivitas KWT dalam mengimplementasikan KRPL dibagi menjadi tiga

aspek, yaitu: (1) aspek A, pengadaan bibit/benih tanaman, yang dinilai berdasarkan pengelolaan bibit rumah dan kebun bibit contoh; (2) aspek B, pengelolaan kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL); dan (3) aspek C, kelembagaan pendukung baik kegiatan pendampingan, peran pemerintah daerah (pemda), serta kelembagaan pasar dan pendukung lainnya. Masing-masing diberi bobot yang berbeda, untuk aspek A dan C masing-masing 30, sementara aspek B diberi bobot 40 karena pengelolaan KRPL lebih banyak berhubungan dengan partisipasi anggota KWT dan masyarakat sekitar.

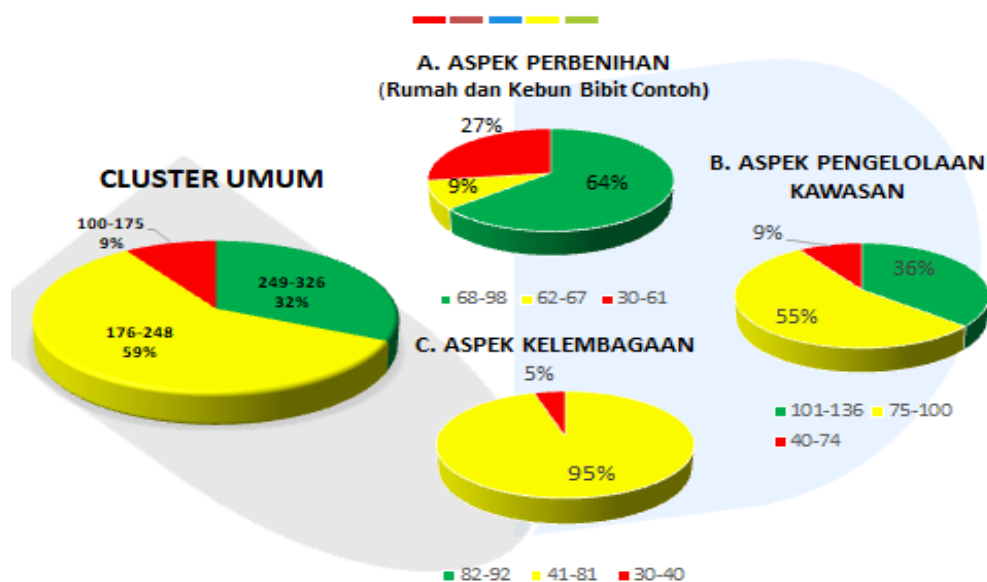
Hasil penilaian di kedua provinsi kluster umum yaitu di Jawa Timur dan Kalimantan Barat, dengan mempertimbangkan ketiga aspek di atas disajikan pada Gambar 1. Implementasi KRPL pada kluster umum menunjukkan 59% memiliki nilai sedang (kuning), 32% baik (hijau), dan 9% buruk (merah). Penilaian baik terutama ditunjukkan dari kesadaran anggota KWT dalam menyediakan sarana seperti benih tanaman dan media tanam yang terus konsisten berlanjut, serta tingkat partisipasi yang tinggi. Sebagian besar anggota KWT (64%) menyediakan benih secara mandiri, baik perorangan maupun secara kelompok. Sementara itu, aspek kelembagaan relatif merata pada kisaran nilai sedang (95%) dari total contoh. Pada umumnya, kelembagaan pasar relatif telah berjalan baik meskipun penjualan masih melalui pola dagang umum, kegiatan pendampingan, dan peran pemerintah

daerah (Pemda) relatif sedang yang ditunjukkan dengan frekuensi kunjungan rata-rata hanya satu kali kunjungan setiap bulan.

Penilaian aktivitas KWT dalam mengimplementasikan KRPL di Provinsi Jawa Timur dapat dilihat pada Gambar 2 dan di Provinsi Kalimantan Barat disajikan pada Gambar 3. Dari kedua gambar tersebut menunjukkan bahwa implementasi KRPL di Jawa Timur relatif lebih baik jika dibandingkan dengan implementasi KRPL di Kalimantan Barat. Penilaian yang relatif baik di Jawa Timur digambarkan dengan warna kuning dan hijau yang lebih dominan, dibandingkan dengan nilai merah (buruk), baik secara umum dari ketiga aspek maupun di setiap aspek (Gambar 2).

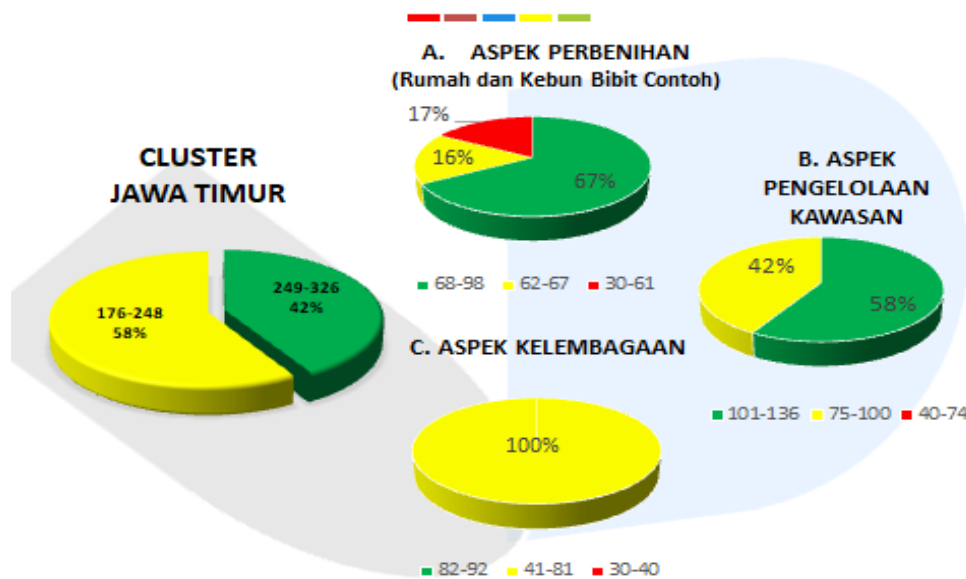
Bila dibandingkan dengan hasil penelitian yang dilakukan Suputra et al. (2016) pada KWT Tunas Sejahtera, Kecamatan Blahbatuh, Kabupaten Gianyar, dapat diketahui bahwa hasil evaluasi dampak Program KRPL menunjukkan dampak teknis masuk dalam kategori baik dengan presentase skor mencapai 76,5%. Dampak ekonomis yang dirasakan responden dalam kegiatan KRPL tergolong kategori sedang dengan persentase skor 66,9%. Sementara dampak sosial tergolong kategori baik dengan pencapaian skor adalah 71,1%.

Nilai buruk pada aspek A, yaitu dalam pengelolaan Rumah Pangan Lestari (RPL) dan kebun benih/bibit contoh dijumpai di Kabupaten



Keterangan: - Warna hijau menunjukkan nilai baik
- Warna kuning menunjukkan nilai sedang
- Warna merah menunjukkan nilai buruk

Gambar 1. Penilaian aktivitas KWT dalam implementasi Program KRPL di Provinsi Jawa Timur dan Kalimantan Barat (n = 22 KWT)



Gambar 2. Penilaian aktivitas KWT dalam implementasi Program KRPL di Provinsi Jawa Timur (n = 12 KWT)

Mojokerto, terutama pada KRPL yang dibangun pada tahun 2015. Namun, bangunan rumah bibit/benih tidak tampak lagi bekasnya karena dibangun di lahan milik perorangan. Sementara itu, penilaian sedang sampai baik dapat diberikan untuk aspek pengelolaan KRPL dan aspek kelembagaan, baik untuk kelembagaan pendamping, peran pemda, dan kelembagaan pasar.

Kasus di Kabupaten Malang, menunjukkan bahwa KWT yang dikunjungi relatif masih aktif, walaupun dibangun pada tahun 2015 dan 2016. Pengadaan benih/bibit (baik perorangan maupun kelompok) serta jaminan pasar yang kuat, diduga memengaruhi keberlanjutan dan kemandirian KWT tersebut. Para pedagang sayur keliling desa yang bersedia melakukan barter antara sayuran hasil KRPL dengan jenis pangan lainnya (tahu, tempe, ikan asin, telur, dan aneka bumbu), bakulan, serta pedagang pengumpul, merupakan jaminan pasar yang menarik bagi anggota KWT untuk terus mengoptimalkan usahatani pekarangannya untuk ditanami.

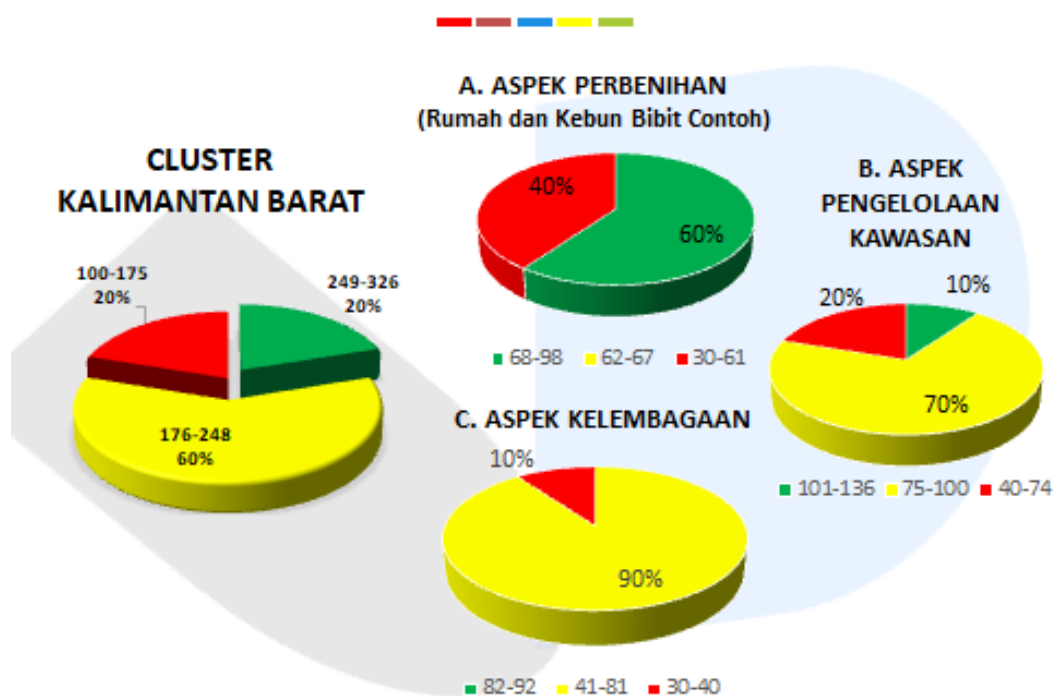
Berbeda dengan kondisi di Jawa Timur, maka implementasi KRPL di Kalimantan Barat relatif mendapatkan penilaian yang beragam. Nilai merah (buruk) mewarnai ketiga aspek penilaian, baik dalam pengelolaan kebun bibit di rumah dan kebun bibit contoh, pengelolaan kawasan rumah pangan lestari, serta penilaian kegiatan

pendampingan dan kelembagaan pendukung. Secara umum, kluster Kalimantan Barat menunjukkan jumlah KWT yang mendapat nilai baik (hijau) dan buruk (merah) secara seimbang, yaitu masing-masing 20%. KRPL yang mendapatkan nilai buruk tersebut terutama yang dibangun pada tahun 2015 dan 2017, dan relatif sulit diharapkan untuk terus berlanjut. Hal tersebut terutama disebabkan rendahnya jaminan pengadaan bibit/benih. Kondisi tersebut juga tidak sepenuhnya didukung oleh partisipasi anggota KWT (aspek B).

Faktor-Faktor yang Memengaruhi Keberhasilan Program KRPL

Dari hasil kunjungan dan pengamatan di lapang serta wawancara dengan pengurus KRPL, anggota KWT peserta, Dinas Petanian atau Dinas Ketahanan Pangan, dan tenaga pendamping (PPL), dapat dikemukakan beberapa faktor yang diperlukan untuk keberhasilan dan keberlanjutan Program KRPL. Faktor penentu keberhasilan tidak bisa berdiri tunggal, tetapi masing-masing saling terkait dan saling memengaruhi antara faktor yang satu dengan faktor lainnya.

Faktor-faktor tersebut dapat diuraikan sebagai berikut: *pertama*, penetapan prioritas area lokasi yang tepat. Penetapan lokasi tidak



Keterangan: - Warna hijau menunjukkan nilai baik
 - Warna kuning menunjukkan nilai sedang
 - Warna merah menunjukkan nilai buruk

Gambar 3. Penilaian aktivitas KWT dalam implementasi Program KRPL di Provinsi Kalimantan Barat (n = 10 KWT)

harus ada banyak tempat, namun dilakukan seleksi dengan mempertimbangkan aspek biofisik, ekonomi, sosial kelembagaan, akses pasar, serta dukungan dari pemerintah kabupaten/kota setempat.

Kedua, penentuan kelompok penerima manfaat secara tepat. Penentuan kelompok sasaran secara tepat, baik dari aspek lokasi strategis, ketersediaan sumberdaya, kesiapan KWT, tokoh masyarakat (*local champion*), dan dukungan pemerintah desa. Sumberdaya yang mencakup lahan pekarangan, ketersediaan sumber air irigasi, media tumbuh tanaman, pupuk kandang atau pupuk organik, bibit, rak, serta alat dan mesin pertanian lainnya.

Ketiga, ketersediaan bibit. Faktor ketersediaan benih/bibit menjadi hal utama penentu keberhasilan KRPL. Bibit adalah teknologi inti yang dapat menentukan penggunaan teknologi budidaya secara tepat. Dengan demikian, keberadaan kebun bibit yang baik menjadi kunci utama keberhasilan Program KRPL. Terpeliharanya kebun bibit yang telah dibangun di fase awal (penumbuhan) harus terus terpelihara sehingga mampu menyediakan bibit berkualitas tinggi dan kontinu. Jika ketersediaan bibit tetap terjaga, maka rumah tangga peserta

Program KRPL dapat mudah memperoleh bibit dan tetap bisa menanam. Dengan demikian, KRPL dapat bertahan dan lestari. Untuk menjamin ketersediaan bibit ini, maka membangun Kebun Bibit Induk (KBI), Kebun Bibit Desa (KBD), Kebun Bibit Sekolah (KBS), Kebun Bibit Rumah Tangga (KBRT) harus dilakukan dengan baik.

Keempat, pentingnya introduksi komoditas unggulan. Pentingnya menentukan komoditas unggulan yang bersifat lokalita yang dapat menjadi penggerak pembangunan ekonomi desa dan pengungkit tingkat pendapatan anggota KWT. Peningkatan pendapatan rumah tangga sangat berpengaruh terhadap keberhasilan dan keberlanjutan Program KRPL.

Kelima, kelembagaan kelompok KRPL yang solid. Konsolidasi kelembagaan dicerminkan dari struktur organisasi yang jelas, peran aktif pengurus dan anggota, serta ada pembagian peran secara fungsional antara pengurus kelompok. Secara khusus, peran ketua kelompok sangat penting sebagai penentu keberhasilan program KRPL. Ketua kelompok tersebut harus memiliki jiwa kepemimpinan (*leadership*) yang mumpuni, mampu mengelola dan memberikan inspirasi dan mampu mengarahkan anggotanya

untuk bersama-sama secara aktif membangun KRPL. Karakteristik ketua kelompok yang berhasil memiliki kemampuan dalam hal teknis budidaya, manajemen usahatani, serta administrasi dan keuangan. Sosok ketua kelompok tersebut juga sangat aktif dan memiliki kemauan untuk membimbing dan memberikan motivasi kepada anggota kelompok sehingga kegiatan kelompok berlangsung secara relatif aktif dan dinamis. Berbagai terobosan, ide kreatif, dan solusi juga sering muncul untuk memajukan kelompok dan masyarakat sekitar. Dengan karakteristik ketua kelompok tersebut, maka ada peluang bagi kelompok untuk berhasil mandiri dan berkelanjutan.

Keenam, perubahan pola pikir (*mindset*) tentang konsumsi sayuran. Pola pikir yang dibangun dalam program KRPL adalah kesadaran tentang pentingnya konsumsi sayuran untuk peningkatan gizi keluarga dan kesehatan anggota rumah tangga. Kelompok yang sudah memiliki pola pikir tentang pentingnya konsumsi sayuran dapat mendorong anggota KRPL untuk secara konsisten dan berkelanjutan menanam sayuran guna memenuhi kebutuhan gizi keluarga. Menurut petugas pendamping kabupaten/kota, diperlukan waktu setidaknya tiga tahun untuk mengubah pola pikir masyarakat. Dengan waktu pembimbingan yang hanya dua tahun untuk KRPL, dipandang belum cukup matang dalam mempersiapkan kemandirian kelompok sasaran program KRPL.

Ketujuh, pengetahuan cara budidaya tanaman, usaha ternak, dan usaha kolam ikan yang baik. Kemampuan budidaya yang memadai dapat berpengaruh terhadap keberhasilan produksi sehingga dapat panen dengan hasil yang baik. Jika panen melebihi kebutuhan konsumsi keluarga, maka sebagian hasil dapat dijual untuk menambah pendapatan keluarga. Kondisi ini dapat menjadi insentif bagi RPL untuk tetap menanam dan melestarikan tanaman, ternak dan ikan di lahan pekarangan. Pola sistem usaha tani terpadu di lahan pekarangan yang mengintegrasikan tanaman, ternak, dan ikan dapat meningkatkan keberhasilan dan keberhasilan program KRPL.

Kedelapan, kegiatan pendampingan yang kontinu. Kegiatan pendampingan dari petugas (terutama PPL pendamping) menjadi syarat pokok untuk keberhasilan KRPL walaupun secara administrasi bantuan alokasi anggaran ke KRPL sudah berakhir. Keberadaan tenaga pendamping dapat memotivasi kelompok dan RPL untuk terus aktif menanam lahan pekarangan dengan aneka sayuran, buah, umbi, serta ternak dan ikan.

Kesembilan, ketersediaan anggaran yang memadai dan tepat waktu. Ketersediaan dan kecukupan anggaran menjadi faktor penting keberhasilan program KRPL. Disamping itu, pencairan anggaran juga harus tepat waktu sehingga kelompok sasaran dapat menyesuaikan dengan kondisi musim atau iklim. Ketidaktepatan atau keterlambatan pencairan anggaran dapat memengaruhi kinerja kelompok. Ketersediaan anggaran untuk pendamping dari yang bersumber dari Pemda/organisasi non pemerintah juga diperlukan. Hal ini terutama untuk mendukung Program KRPL paska bantuan pusat telah selesai atau di fase kemandirian. Anggaran dapat diwujudkan dalam bentuk bantuan natura (saprodi) maupun untuk pembinaan atau pendampingan KRPL.

Kesepuluh, tertib monitoring dan pelaporan. Kegiatan monitoring dilakukan dengan tertib oleh pendamping/petugas di kabupaten/kota dapat mendeteksi secara dini jika ada yang tidak sesuai antara perencanaan dan pelaksanaan. Disamping itu, jika ada permasalahan dalam pelaksanaan juga dapat segera dicari solusinya. Demikian juga dengan adanya kewajiban untuk melakukan pelaporan dalam periode tertentu, KWT umumnya lebih serius dalam melaksanakan kegiatan sesuai juknis dan yang telah disepakati (perencanaan) oleh kelompok. Dengan adanya monitoring dan pelaporan maka perencana dan pelaksana program KRPL mendapatkan umpan balik (*feed back*) yang sangat penting guna penyempurnaan program KRPL ke depan.

Kesebelas, sistem koordinasi yang efektif. Membangun sistem koordinasi yang efektif antar-*stakeholders* yang ada di masing-masing wilayah penumbuhan, pengembangan, dan kemandirian. Stakeholder tersebut terdiri dari unsur pemerintah, masyarakat, dan swasta. Keefektifan sistem koordinasi dari ketiga stakeholder tersebut dapat meningkatkan efektivitas pelaksanaan program yang sangat menentukan keberhasilan dan keberlanjutan program KRPL.

Faktor-faktor yang paling berpengaruh terhadap keberhasilan: (a) ketersediaan media tanam (alat/rak, tanah lapisan *top soil*, pupuk organik, polybag, bibit, serta pestisida kimiawi dan nabati); (b) ketersediaan sumber air, mengakses sumber air, dan pemanfaatannya secara efisien; (c) adanya kelembagaan pasar (kios desa, pasar mini, pasar desa) dan kemitraan usaha (pedagang pengumpul, pedagang keliling, *supermarket/hypermarket*) untuk menampung kelebihan produksi; dan (d) pengolahan hasil yang dapat meningkatkan nilai tambah dan daya saing produk, serta

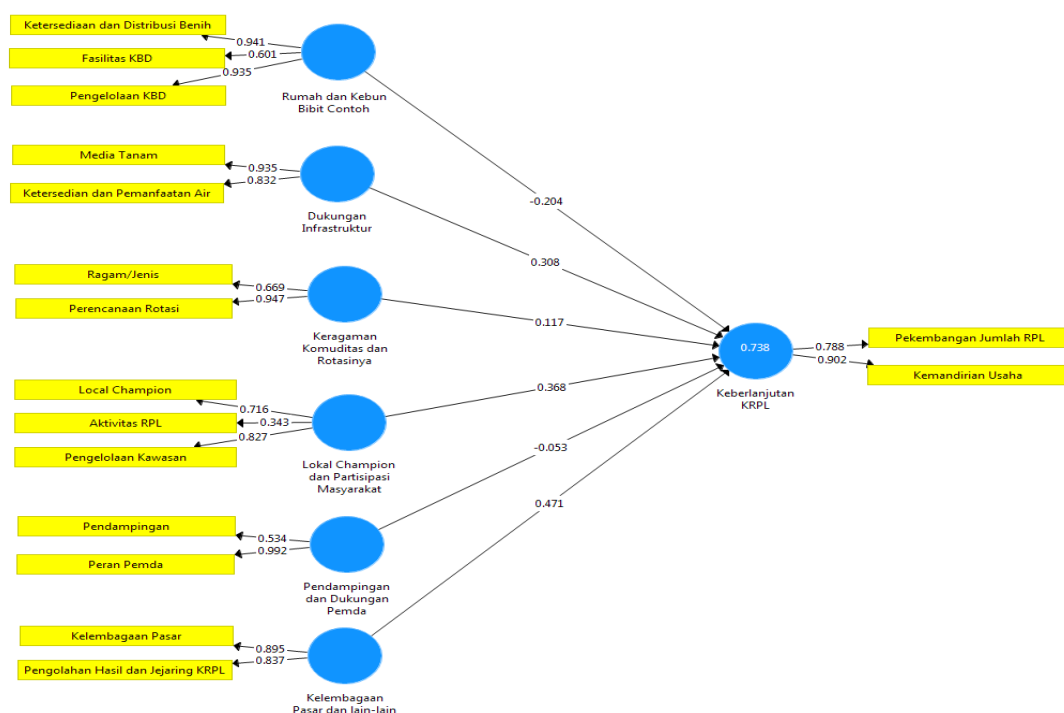
memperluas jejaring KRPL. Hasil penelitian ini sejalan dengan kajian yang dilakukan Sirnawati et al. (2015) yang mengungkapkan bahwa terdapat 10 variabel dari 36 variabel yang berpengaruh secara positif terhadap peningkatan keberhasilan pelaksanaan KRPL di Pulau Sumatera, yaitu sumber benih, ketersediaan bibit, jumlah Rumah Pangan Lestari (RPL), rotasi tanaman, integrasi tanaman-ternak, konservasi pangan lokal, pemanfaatan hasil panen, administrasi, keterlibatan aparat, serta ketersediaan dan akses pasar.

Tingkat keberhasilan program KRPL ditunjukkan dari hasil penelitian Oka et al. (2016) pada KWT di Kabupaten Gianyar yang tergolong sangat berhasil. Pelaksanaan program KRPL memiliki pengaruh positif terhadap pendapatan rumah tangga dan peningkatan asupan gizi keluarga pada KWT di Kabupaten Gianyar. Hal ini dapat dilihat dari nilai PPH di lokasi penelitian sebesar 71,5, serta penerimaan rata-rata dari pemanfaatan pekarangan rumah sebesar Rp. 48.448 /bulan. Sementara itu hasil kajian (Annisahaq et al. 2014) dengan membandingkan antara peserta KRPL dengan nonpeserta KRPL diperoleh dampak yang lebih besar yang ditunjukkan dengan skor PPH rata-rata untuk peserta KRPL di Kelurahan Rejomulyo, Kecamatan Kota Kediri, Kabupaten Kediri mencapai 80.53 dan non anggota KRPL hanya sebesar 62.32 atau naik sebesar 29,22 persen. Meskipun skor tersebut masih berada di bawah skor PPH ideal, yaitu 100.

Faktor-Faktor Penentu Keberlanjutan Program KRPL

Implementasi program KRPL yang dilaksanakan oleh KWT sejak awal dibangun hingga saat ini tetap eksis dan bahkan di beberapa lokasi mampu mandiri. Pada Pedoman Umum pengembangan M-KRPL yang disusun oleh Balitbangtan (2013), ada tujuh pilar atau faktor yang memengaruhi keberlanjutan maupun kemandirian KRPL, yaitu: (1) pengadaan benih/bibit di Kebun Bibit Desa (KBD) sebagai sumber bibit desa; (2) sarana dan prasarana, seperti ketersediaan dan pemanfaatan air, media tanam, pupuk organik dan sarana produksi lainnya; (3) keragaman jenis tanaman dan rotasi tanaman, tercakup ternak dan ikan; (4) dukungan tokoh masyarakat (*local champion*) yang mampu menggerakkan anggota; (5) partisipasi aktif dari anggota KWT dan masyarakat sekitar; (6) kegiatan pendampingan dan dukungan pemda; dan (7) kelembagaan pasar dan pengolahan hasil.

Berdasarkan ketujuh pilar tersebut, maka dirumuskan indikator-indikator yang dapat menjelaskan masing-masing pilar atau faktor yang dianggap sebagai variabel laten. Model awal tersebut belum fit, ditunjukkan dengan banyaknya variabel yang tidak signifikan walaupun mempunyai $R^2 = 0,738$ (relatif tinggi) (Gambar 4). Model yang fit diperoleh dengan $R^2 = 0,686$ dan nilai *Average Variance Extracted* (AVE) > 0,5 dan *Composite Reliability* (CR) > 0,7



Gambar 4. Model (awal) faktor-faktor yang memengaruhi keberlanjutan Program KRPL

(Gambar 5). Model tersebut menunjukkan bahwa faktor-faktor yang paling berpengaruh terhadap keberlanjutan dan kemandirian KRPL adalah: (1) dukungan infrastruktur, diwakili atau dijelaskan oleh dua indikator, yaitu (i) ketersediaan media tanam dan (ii) ketersediaan dan pemanfaatan air untuk menyiram tanaman; (2) kelembagaan pendukung, diwakili atau dijelaskan oleh dua indikator yaitu: (i) kelembagaan pasar; dan (ii) pengolahan hasil dan adanya jejaring antar KRPL.

Model yang fit (Gambar 5) juga sangat sesuai dengan kondisi di lapang, bahwa kedua faktor tersebut yang tampak nyata dapat dijumpai pada KRPL yang masih tetap bertahan hingga saat ini. KRPL dapat berkelanjutan dan mandiri bila di kawasan tersebut masyarakat dapat dengan mudah memperoleh media tanam (tanah lapisan *top soil*, wadah/pot/polybag, pupuk kompos/pupuk organik), serta mudah memanfaatkan air untuk menyiram tanaman. Demikian juga kelembagaan pasar, seperti pedagang sayur keliling, bakul, pedagang pengumpul, pasar tradisional, dan pasar modern yang mudah dijangkau, semuanya menjadi syarat utama yang perlu diperhatikan untuk keberlanjutan program KRPL.

Temuan di atas didukung hasil penelitian Putri et al. (2015) yang menggunakan analisis dengan MDS (*Multidimensional Scale*) pada Kawasan Rumah Pangan Lestari Desa Girimoyo, Karangploso, Malang berada dalam tingkat indeks keberlanjutan 63,84% dengan status keberlanjutan cukup berkelanjutan. Sementara itu, hasil penelitian Manoppo dan Yusuf (2018) menggunakan analisis SEM menunjukkan bahwa faktor-faktor yang memengaruhi persepsi positif terhadap keberlanjutan pemanfaatan pekarangan adalah peran kelompok (kelas

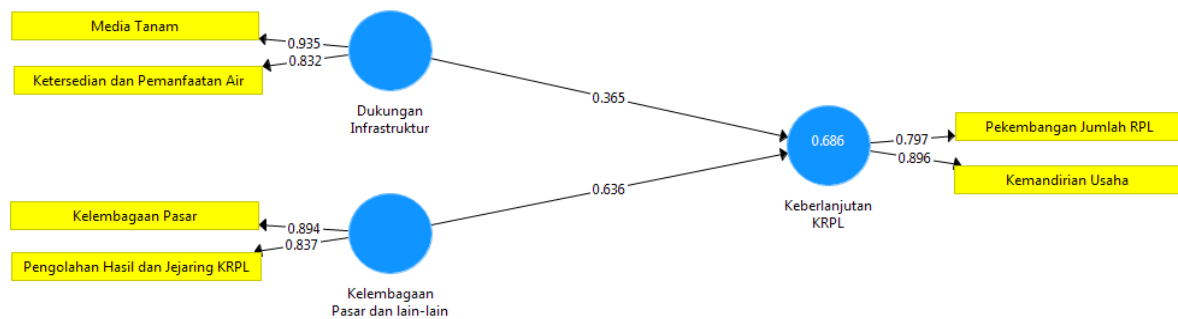
belajar mengajar) dan peran penyuluhan atau pendampingan yang memungkinkan proses diseminasi dan adopsi teknologi berjalan dengan efektif.

Kendala dalam Pelaksanaan Program KRPL

Kendala Teknis

Pelaksanaan Program KRPL menghadapi kendala dan permasalahan, baik dari aspek teknis, ekonomi, kelembagaan, dan kebijakan (Saptana et al. 2019). Kendala teknis berkaitan dengan teknologi dan kondisi biofisik. Kondisi lahan pekarangan berstruktur keras karena jarang diolah petani sehingga dalam pengolahan tanah perlu diberi pupuk organik secara cukup memadai. Kesulitan air pada saat MK dan perlu menggunakan PDAM sehingga bersaing dengan kebutuhan air rumah tangga. Beberapa lokasi KRPL menghadapi permasalahan kondisi cuaca yang cukup ekstrim, terutama lahan pekarangan dan lahan demplot ada yang terendam banjir di MH dan sangat kering ketika MK. Kondisi ini dapat menghambat kegiatan penanaman terutama jenis tanaman sayuran. Pada saat MK sulit menyiram tanaman, sementara pada MH, tanaman mudah rusak karena curah hujan tinggi. Alternatif solusinya adalah dengan membuat para-para atau vertikal kultur, tetapi membutuhkan biaya tambahan yang cukup besar.

Kondisi tanah di beberapa lokasi program KRPL di Kalimantan Barat kurang subur. Hal ini menyebabkan rumah tangga tidak bisa menanam sayuran langsung di lahan dan harus menggunakan media tanam dan polybag. Kondisi tersebut cukup menyulitkan bagi KWT, terutama jika bantuan ke kelompok sudah berakhir. Akibatnya, beberapa rumah tangga



Average Variance Extracted (AVE)	
	AVE
X ₂	0,784
X ₆	0,719
Y	0,750

*Nilai AVE yang valid >0,5

Composite Reliability (CR)	
	CR
X ₂	0,878
X ₆	0,836
Y	0,857

*Nilai CR yang valid >0,7

Gambar 5. Model (fit) faktor-faktor yang memengaruhi keberlanjutan Program KRPL

terpaksa berhenti untuk bertanam sayuran. Beberapa anggota KWT belum memiliki keterampilan memadai tentang teknologi pembibitan dan budidaya sayuran. Hal ini berdampak pada pertumbuhan tanaman di beberapa RPL tidak optimal. Kondisi ini bisa diperparah jika tanaman terserang organisme pengganggu tanaman (OPT) yang menyebabkan hasil panen menurun drastis.

Teknis budidaya dan sistem rotasi tanaman belum dikuasai dengan baik. Baik itu pengurus maupun anggota, kurang memahami bahwa tanaman cabai, tomat, dan terung masih dalam satu famili. Jika tanaman tersebut ditanam secara berulang dan terus menerus, maka tidak terjadi pemutusan siklus hama dan penyakit. Serangan OPT yang sering muncul pada tanaman sayuran adalah ulat, kutu/kebul, serta virus kuning pada cabai rawit dan cabai merah, sedangkan pada tanaman buah yaitu lalat buah, ulat, dan kutu/kebul. Penyakit pada ternak unggas yang dapat menyebabkan kematian adalah CRD, E. Colli, Gumboro, dan ND, tetelo. Serangan hama yang ditemui pada ikan adalah lingsang dan musang. Sebagian KWT membeli bibit sayuran hibrida dari toko pertanian, sehingga jika ditanam berulang maka tingkat produktivitas menurun. Belum ditemukan sistem penataan *landscape* KRPL dengan baik, padahal kegiatan ini ke depan dapat diintegrasikan dengan program desa wisata atau kampung wisata.

Kendala Ekonomi

Kendala ekonomi yang ditemui dalam Program KRPL terkait dengan harga input, harga output, dan aspek permodalan (Saptana et al. 2013). Permasalahan pokok yang dihadapi oleh KWT adalah kurangnya kemampuan permodalan baik untuk modal investasi maupun modal kerja. Akibatnya, jika tidak ada bantuan lagi dari pemerintah maka beberapa Program KRPL untuk tahun periode 2015 – 2017 terancam terhenti dan tidak berkelanjutan. Tingginya harga input, terutama benih/bibit sayuran dan tanaman buah, pupuk kimia nonsubsidi, pestisida kimiawi, bibit unggas (DOC) dan pakan ternak, serta bibit ikan dan pakan ikan. Jika bantuan terhenti, maka program terancam tidak berkelanjutan. Sebagian KRPL tidak berjalan kegiatannya setelah fase kemandirian atau ketika sudah tidak mendapat bantuan pemerintah. Salah satu penyebabnya karena tidak mampu membeli sarana produksi. Ketiakmampuan memupuk permodalan kelompok (kas kelompok) maupun uang kas di masing-masing RPL menjadi penyebab terjadinya kevakuman kegiatan. Sebagian besar KRPL di Jawa Timur memiliki kemampuan

memupuk modal kelompok, sedangkan di Kalimantan tidak memiliki kemampuan yang sama. Beberapa KRPL yang memiliki kas kelompok, umumnya aktivitasnya masih tetap berjalan walaupun sudah tidak mendapatkan bantuan pemerintah. Kondisi ini mendukung keberlanjutan kegiatan tanam sayur sangat tergantung dari masing-masing individu RPL.

Penentuan harga jual hasil masih tergantung pada pedagang pengumpul atau pedagang keliling. Hal ini menyebabkan keuntungan yang diperoleh anggota kelompok KRPL masih relatif rendah. Mulai adanya persaingan dalam menjual hasil sayuran segar antar KRPL, dikarenakan jenis tanaman sayuran, buah, ternak, dan ikan yang diusahakan hampir sama. Sementara, pada sisi lain volume dan tujuan pasar masih terbatas karena masih mengandalkan pasar setempat. KWT yang berhasil menjalin kemitraan usaha dengan *supermarket*, restoran/rumah makan, dan pusat pasar sayur mendapatkan keuntungan yang tinggi (Saptana et al. 2012).

Kendala Sosial Kelembagaan

Kendala sosial kelembagaan dalam pelaksanaan Program KRPL meliputi kelembagaan pengelola kebun bibit dan kelembagaan KWT. Pada awal Program KRPL, kebutuhan bibit di RPL disediakan oleh KBD. Walaupun demikian, bagi sebagian anggota RPL pada tahun pertama menanam sayuran dianggap cukup memberatkan karena mendapat tugas ekstra dalam merawat tanaman. Peran tenaga pendamping sangat penting dalam memotivasi anggota RPL. Setelah tahun kedua, RPL harus belajar melakukan pembibitan sendiri yang membutuhkan kesungguhan dan ketelatenan. RPL yang berhenti menanam sayuran disebabkan karena kurang telaten dan memiliki pengetahuan budidaya yang terbatas. Selain itu, terdapat permasalahan terkait pola pikir peserta terhadap arti pentingnya mengonsumsi sayuran, buah, dan umbi lokal. Anggota RPL yang sudah memiliki pola pikir bahwa mengonsumsi sayuran, buah, dan umbi lokal adalah sehat, maka dapat termotivasi untuk berusaha terus menanam. Namun, bagi yang menganggap tidak terlalu penting mengonsumsi sayuran, buah, dan umbi lokal, cenderung tidak bersungguh-sungguh dan berhenti menanam tanaman-tanaman tersebut.

Setelah Program KRPL selesai, sebagian anggota cenderung menurun aktivitas pengelolaan pekarangannya. Sebagian anggota KRPL yang belum mandiri, masih sangat tergantung pada ketua kelompok dan tenaga pendamping. Keberlanjutan program KRPL pasca bantuan sangat tergantung dari keaktifan

ketua, pengurus kelompok, dan pendamping dalam memotivasi anggota untuk terus menanam. Kondisi ini cukup rawan bagi keberlanjutan Program KRPL, jika ketua terlalu sibuk atau menjadi tidak semangat lagi karena merasa bekerja keras sendiri. Oleh karena itu, adanya kaderisasi dalam pelaksanaan Program KRPL sangat penting, seperti yang diinisiasi pada Program M-KRPL di Kayen Pacitan (Saptana et al. 2012).

Keberadaan demplot yang umumnya dapat menghasilkan panen yang melimpah, terkadang menimbulkan masalah. Jika sayuran sudah cukup didapat dari demplot, anggota tidak semangat menanam di pekarangan masing-masing. Idealnya untuk hasil demplot bisa dijadikan tambahan atau pemupukan modal kelompok dengan menjual hasilnya. Namun, praktiknya hasil demplot rata-rata dibagikan secara cuma-cuma ke anggota. Perlu adanya perubahan orientasi dari produksi untuk pemenuhan keluarga ke arah produksi untuk tujuan komersial.

Pada umumnya, KRPL belum memiliki pembukuan atau administrasi keuangan yang tertib terkait arus tunai dan barang atau aset yang dimiliki. Pada umumnya, pengurus cenderung tertib di awal program atau ketika menerima bantuan. Setelah selesai program, pencatatan terkait administrasi dan keuangan Program KRPL kurang dilakukan dengan baik.

Peran aktif anggota kelompok masih rendah terutama dalam hal penyusunan RUK dan RKKA, serta kegiatan kelompok. Hal ini dikarenakan terdapat kecenderungan yang aktif hanya pengurus. Kondisi ini sangat berpengaruh terhadap keberhasilan kelompok dalam mengembangkan usaha dan penguatan kelembagaan pengelola. Lemahnya konsolidasi kelembagaan KWT, baik dari aspek manajemen, permodalan, serta partisipasi anggota dapat menghambat Kinerja KRPL. Kurang efektifnya sistem koordinasi antar kelembagaan KWT, pemerintah desa, dan kelembagaan ekonomi dapat menjadi penghambat tersendiri.

Kendala Kebijakan Pendukung

Kendala kebijakan pendukung mencakup kebijakan pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Kebijakan pengembangan Program KRPL merupakan program pemerintah pusat melalui dukungan teknologi Balitbangtan dan kegiatan BKP Kementerian Pertanian. Kebijakan pendukung yang dirasakan rendah adalah kurangnya dukungan anggaran pemda untuk bantuan kelompok dan pendamping lapang. Dukungan dari pemda sangat dibutuhkan saat

bantuan dari pusat berakhir. Dengan ketiadaan anggaran di beberapa daerah, mengakibatkan keberlanjutan Program KRPL terganggu, bahkan terhenti. Dengan demikian, diperlukan *exit strategy* dan penyerahan program tersebut ke Pemda jika sudah dinilai mandiri. Perlombaan pengelolaan lahan pekarangan dapat memotivasi pengurus dan anggota terhadap keberlanjutan program KRPL, seperti yang ditemukan pada Program KRPL plus di Provinsi Jawa Timur dan kasus pengelolaan Program KRPL dilingkungan Kodim Pacitan (Saptana et al. 2013).

Periode pelaksanaan Program KRPL yang hanya 2 – 3 tahun dianggap terlalu singkat oleh sebagian pemda dan kelompok sasaran. Dengan waktu yang singkat belum mampu membangun sebuah kelembagaan yang kokoh dan pemberdayaan masyarakat yang kuat, terutama dalam aspek pembibitan, manajemen kelompok, permodalan, dan pemasaran. Belum ada kebijakan yang komprehensif untuk melakukan koordinasi antar kelembagaan masyarakat, kelembagaan ekonomi, dan pemerintah; konsolidasi kelembagaan KWT, serta koordinasi program lintas sektor. Hal ini menyebabkan belum optimalnya pemberdayaan masyarakat dalam menyediakan bahan pangan B2SA. Sinkronisasi antar program pembangunan pertanian yang sejenis kurang berjalan secara efektif antara Kementerian dan Lembaga pemerintah, serta pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Pemerintah belum mampu menjaga stabilitas harga-harga hasil pertanian, baik sayur, buah, hasil ternak, dan ikan sehingga sebagian besar petani terjebak melakukan transaksi hanya dengan pedagang pengumpul (tengkulak) dengan harga jual yang rendah.

Prospek dan Keberlanjutan Program KRPL

Hasil evaluasi kinerja terhadap pelaksanaan Program KRPL secara keseluruhan menunjukkan: (1) tahapan pengembangan Program KRPL kurang dilakukan melalui proses sosial yang matang; (2) konsolidasi kelembagaan pengelola KRPL masih lemah, baik dari aspek manajemen, permodalan, dan partisipasi anggota; (3) distribusi bantuan dari anggaran pemerintah pusat dalam bentuk APBN (Dekon dan TP) langsung ke dalam rekening kelompok dipandang tepat, namun perlu diimbangi kemampuan pengurus dalam manajemen administrasi dan pengelolaan keuangan yang baik; (4) pembinaan dan pendampingan banyak dilakukan melalui pendekatan individual dan kelompok melalui kunjungan dan pertemuan-pertemuan, namun

dengan frekuensi kunjungan yang kurang memadai; (5) pengembangan kelembagaan di pedesaan cenderung dilakukan melalui budaya material, kurang melalui pendekatan penguatan kelembagaan dan pemberdayaan masyarakat (Saptana et al. 2013); (6) menggunakan teknologi sebagai *entry point* dengan teknologi intinya kebun bibit, demplot kelompok, bantuan sarana produksi, namun masih lemah dalam introduksi teknologi pascapanen, pengolahan, dan pemasaran hasil; (7) infrastruktur pendukung, baik fisik maupun kelembagaan, belum dikembangkan dengan baik; dan (8) program pendukung dari pemda dan pemerintah desa masih rendah dan belum teintegrasi dengan baik.

Keberlanjutan Program KRPL sangat ditentukan oleh aspek pelaksanaan, aspek pendukung, dan aspek promosi, serta sinergi antar program. Dalam aspek pelaksanaan harus dipersiapkan secara baik beberapa hal penting, yaitu: (1) Juklak atau Juknis Program KRPL yang mudah dipahami dan diimplementasikan di lapang; (2) sosialisasi program secara berkala agar pelaksana pada berbagai tingkatan termotivasi dan memiliki komitmen yang tinggi; (3) pendampingan secara berkala dan terus menerus untuk memberikan motivasi bagi tokoh masyarakat (*local champion*) dan para rumah tangga (RPL), pelaksanaan berjalan baik dan tujuan tercapai sesuai dengan yang telah direncanakan; dan (4) melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala untuk mendapatkan umpan balik (*feed back*) guna penyempurnaan Program KRPL dari aspek konsepsi dan kebijakan, implementasi kegiatan, serta pemecahan masalah teknis dan sosial ekonomi di lapangan.

Saptana et al. (2013) menyatakan aspek pendukung yang perlu mendapatkan perhatian adalah yang diperkaya dengan temuan empiris di lapang: (1) perlu direncanakan kebutuhan benih/bibit dalam satu kawasan secara tepat; (2) perlu penyediaan alat/rak, media tumbuh seperti pupuk organik, benih/bibit, pupuk kimia, pestisida nabati/kimiawi, serta jaringan irigasi; (3) adanya komoditas unggulan di tingkat lokal atau daerah sebagai pengungkit peningkatan pendapatan; (4) kelembagaan pengelola KRPL yang solid dan berbasis berbasis kelembagaan lokal dan partisipasi anggota, perlu adanya alat perekat sosial, seperti KBD, alat dan mesin pertanian, bantuan modal yang cukup sebagai *seed capital*, *packaging house*, alat dan mesin pengolah, dan baju seragam; (5) adanya *leading institution* dalam pengembangan KRPL, yaitu Dinas Pertanian dan BKP provinsi dan Kabupaten yang dapat memadukan antar program baik dari pusat maupun dari daerah; (6) pengembangan

penanganan pascapanen dan pengolahan hasil berbasis produksi hasil pekarangan; (7) ketersediaan kelembagaan pasar, jaringan kemitraan usaha, baik antar KRPL maupun dengan pelaku usaha swasta, untuk menampung kelebihan produksi.

Aspek promosi Program KRPL dapat dilakukan melalui (Saptana et al, 2013) yang dilengkapi dengan temuan empiris di lapang: (1) temu lapang secara berkala untuk memotivasi dusun/desa sekitar yang belum melaksanakan Program KRPL; (2) advokasi secara berkala ke pemangku kebijakan di tingkat desa, kecamatan, kabupaten, provinsi tentang manfaat ekonomi dan estetika dari Program KRPL; (3) kegiatan lomba dan penghargaan pemanfaatan pekarangan pada berbagai tingkatan (desa, kecamatan, kabupaten, provinsi, dan nasional); dan (4) studi banding ke luar wilayah dimana KRPL berkinerja baik, dari aspek budidaya tanaman, produksi pertanian organik, pengolahan hasil, dan jaringan pemasarannya.

Pentingnya sinergi program antara Program KRPL dari pusat dengan program atau kegiatan sejenis dari provinsi dan kabupaten/kota. Seperti yang disampaikan Saptana et al. (2013), dalam perencanaan dan implementasinya perlu dirumuskan bersama dalam aspek dengan penyempurnaan hasil kajian lapang: (1) lokasi (rumah tangga, dusun, desa, kecamatan, kabupaten) dengan mempertimbangkan infrastruktur pendukung dan ketersediaan pasar; (2) rumah dan KBD, KBS, demplot kelompok sebagai percontohan, tentang desain dan fasilitas pendukungnya, serta keragaman jenis benih/bibit, jumlah yang akan dikembangkan, sasaran jumlah, kualitas dan kontinuitas produksi yang dihasilkan; (3) pendampingan kelompok sasaran, baik oleh petugas BPTP, Dinas Pertanian, maupun pendamping/PPL, untuk terus memberikan motivasi bagi RPL; (4) teknologi pengolahan berbasis pangan lokal yang mampu menciptakan nilai tambah dan daya saing produk; dan (5) promosi, diseminasi, dan replikasi Program KRPL ke lokasi atau wilayah lain sehingga terbentuk KRPL yang mencapai skala ekonomi.

KESIMPULAN DAN IMPLIKASI KEBIJAKAN

Kesimpulan

Hasil evaluasi Program KRPL secara keseluruhan menunjukkan kinerja Program KRPL masuk dalam kategori sedang hingga baik dan sebagian besar sudah sesuai dengan yang

telah ditetapkan dalam pedoman teknis/petunjuk pelaksanaan. Program KRPL memberikan dampak terhadap peningkatan ketersediaan pangan keluarga yang bersumber dari produksi hasil KRPL. Jenis komoditas yang dihasilkan adalah pangan berasal dari produksi sayuran, buah-buahan, umbi-umbian, telur, daging ayam, dan ikan. Dampak dari Program KRPL terhadap konsumsi pangan keluarga sangat signifikan, baik dalam volume maupun keragaman jenis pangan. Hal ini dikarenakan sebagian besar hasil dari produksi KRPL diperuntukkan untuk konsumsi keluarga dan sebagian dijual untuk menambah pendapatan.

Faktor-faktor yang memengaruhi keberhasilan Program KRPL adalah (a) ketersediaan kebun bibit sebagai penyedia bibit bagi kelompok dan masyarakat; (b) pendampingan untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan teknis, dan kapabilitas manajerialnya; (c) soliditas kelembagaan KWT yang direfleksikan oleh struktur organisasi sesuai dengan fungsi yang dijalankan, peran aktif pengurus dan anggota, dan adanya pembagian peran dalam kelompok; (d) keberadaan *local champion*, keterlibatan tokoh masyarakat/agama/adat dalam mendinamisasi kegiatan KWT; (e) kesesuaian komoditas dengan potensi lokal dan kebutuhan konsumsi masyarakat; (f) partisipasi aktif anggota masyarakat sekitar; dan (g) adanya infrastruktur pendukung, baik fisik maupun kelembagaan.

Kendala-kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan program KRPL terdiri atas kendala teknis, ekonomi, sosial kelembagaan, dan kebijakan pendukung. Kendala teknis yang utama adalah struktur lahan pekarangan yang keras karena jarang diolah, kompetisi penggunaan air terutama pada musim kemarau, teknik budidaya khususnya aspek rotasi tanaman, serta serangan hama dan penyakit. Kendala ekonomi yang dihadapi oleh KWT adalah kurangnya kemampuan mengolah permodalan dengan baik untuk modal investasi maupun modal kerja; tingginya harga input terutama benih/bibit, pupuk kimia nonsubsidi, dan pestisida kimiawi; serta fluktuasi harga jual output. Kendala sosial kelembagaan adalah konsolidasi kelembagaan masih lemah, sistem koordinasi antar kelembagaan di tingkat lokal belum efektif. Kendala kebijakan pendukung adalah periode program yang terlalu singkat, keterlambatan dalam pencairan dana dan sistem koordinasi program lintas sektor belum terpadu.

Hasil evaluasi kinerja terhadap pelaksanaan Program KRPL secara keseluruhan menunjukkan bahwa Program KRPL memiliki

prospek dan peluang berkelanjutan. Faktor-faktor yang paling berpengaruh terhadap keberlanjutan Program KRPL, adalah: (a) ketersediaan media tanam (alat/rak, tanah lapisan *top soil*, pupuk organik, polybag, serta pestisida kimiawi dan nabati); (b) ketersediaan KBD dan benih/bibit sesuai kebutuhan anggota RPL khususnya komoditas unggulan secara efisien untuk kegiatan usahatani; (d) adanya kegiatan pendampingan secara kontinyu dengan materi yang terus diperbaharui; (e) adanya kelembagaan pasar di tingkat lokal (kios desa, pasar mini, pasar desa, *supermarket/hypermarket*) dan kemitraan usaha (pedagang pengumpul, pedagang keliling, *supermarket/hypermarket*); dan (f) pengolahan hasil yang dapat meningkatkan nilai tambah dan jejaring KRPL.

Implikasi Kebijakan

Alternatif kebijakan untuk menjaga keberlanjutan program KRPL yang dapat diimplementasikan adalah:

1. Bagi KWT pelaksana KRPL dengan kinerja sedang dan kinerja baik, melalui kegiatan pendampingan baik oleh bimbingan teknis dari penyuluh BPTP, pendampingan teknis dan manajemen dari PPL kabupaten/kota, serta pendampingan teknis dan manajemen dari pendamping kelompok.
2. Pendampingan teknis dan manajemen pada KWT pelaksana KRPL kinerja sedang dan baik pada tahap pengembangan dan kemandirian difokuskan pada teknologi pascapanen, pengolahan hasil, serta akses pasar dan dalam membangun jejaring kemitraan usaha.
3. Untuk KWT pelaksana KRPL pada tahap penumbuhan baru dilakukan melalui pendampingan teknis dan manajemen yang difokuskan pada penguatan kelembagaan KWT, menggerakkan partisipasi anggota.
4. Bagi KWT pelaksana KRPL tahap penumbuhan, kegiatan bimbingan teknis dan manajemen difokuskan pada teknologi pembibitan dan budidaya tanaman yang telah ada, serta tanaman introduksi yang diminati anggota kelompok.

UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terimakasih disampaikan kepada saudara Wieta B. Komalasari, Sabarella, Ngadiningih, Leila Febrianti, Maria Rosalin,

Nardi, Mulyana, Agus Tri, dan Achmad Suryana atas masukan dan saran dalam penyempurnaan tulisan ini.

DAFTAR PUSTAKA

- [Balitbangtan] Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian. 2013. Pedoman umum pengembangan Model Kawasan Rumah Pangan Lestari (M-KRPL). Jakarta (ID): Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian.
- [Bappenas] Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. 2012. Buku pegangan perencanaan pembangunan daerah memperkuat perekonomian domestik bagi peningkatan dan perluasan kesejahteraan rakyat. Jakarta (ID): Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.
- [FAO] Food and Agriculture Organization. 2014. Global dialogue family farming. Roma (IT): Food and Agriculture Organization.
- Abdullah M. 2015. Metodologi penelitian kuantitatif. Yogyakarta (ID): Aswaja Pressindo.
- Annisahaq A, Hanani N, Syafrial. 2014. Pengaruh program Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL) dalam mendukung kemandirian pangan dan kesejahteraan rumah tangga (kasus di Kelurahan Rejomulyo, Kecamatan Kota, Kota Kediri). *Habitat*. 25(1):32–39.
- Ashari, Saptana, Purwantini TB. 2012. Potensi dan Prospek Pemanfaatan Lahan Pekarangan Untuk Mendukung Ketahanan Pangan. *Forum Penelit Agro Ekon* [internet]. [diunduh 2020 Jun 12]; 30(1):13-30. Tersedia dari: doi:http://dx.doi.org/10.21082/fae.v30n1.2012.13-30.
- Farahdiba Z, Achdiyati, Saridewi TR. 2020. Peran anggota kelompok wanita tani dalam pemanfaatan lahan pekarangan di Kelurahan Pasir Putih, Kecamatan Sawangan, Kota Depok. *J Inov Penelit*. 1(3):535–544.
- Irwan, Adam K. 2015. Metode Partial Least Square (PLS) dan terapannya (studi kasus: analisis kepuasan pelanggan terhadap layanan PDAM Unit Camming Kab. Bone). *J Teknosains*. 9(1):53–68.
- Manoppo CN, Yusuf. 2018. Analisis faktor yang memengaruhi persepsi kelompok wanita terhadap pemanfaatan pekarangan. *Bul Agrosaintek Sulawesi Utara*. 4(1):11–19.
- Mardiharini M. 2011. Model kawasan rumah pangan lestari dan pengembangannya ke seluruh provinsi di Indonesia. *War Penelit dan Pengemb Pertan*. 33(6):3–5.
- Mattjik AA, Sumertajaya IM. 2011. Sidik peubah ganda dengan menggunakan SAS. Wibawa GNA, Hadi AF, editors. Bogor (ID): IPB Press.
- Mudrieq SH. 2013. Problematika krisis pangan dunia dan dampaknya bagi Indonesia. *J Acad Fisip* Untad. 5(2):1287–1302.
- Munthe AP. 2015. Pentingnya evaluasi program di institusi pendidikan: sebuah pengantar, pengertian, tujuan dan manfaat. *J Sch*. 5(2):1–14.
- Oka IGADS, Darmawan DP, Astiti NWS. 2016. Keberhasilan program Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL) pada kelompok wanita tani di Kabupaten Gianyar. *J Manaj Agribisnis*. 4(2):133–146. <https://ojs.unud.ac.id/index.php/agribisnis/article>.
- Putri N, Aini N, Heddy Y. 2015. Evaluasi keberlanjutan Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL) di Desa Girimoyo, Kecamatan Karangploso, Malang. *J Produksi Tanam* [internet]. [diunduh 2020 Jun 12]; 3(4):278–285. Tersedia dari: <https://media.neliti.com/media/publications/129717-ID-evaluasi-keberlanjutan-kawasan-rumah-pang.pdf>.
- Refita Y, Siregar H, Suroso AI. 2017. Evaluasi Program Sarjana Membangun Desa (SMD) dan strategi pengembangannya (studi kasus provinsi Sumatera Barat, Jawa Barat dan Nusa Tenggara Barat). *J Reg Rural Dev Plan (Jurnal Perenc Pembang Wil dan Perdesaan)* [internet]. [diunduh 2020 Jun 12]; 1(1):98–113. Tersedia dari: doi:<https://doi.org/10.29244/jp2wd.2017.1.1.98-113>. <https://journal.ipb.ac.id/index.php/p2wd/article/view/15537>.
- Saptana, Friyatno S, Sunarsih. 2012. Laporan akhir penelitian TA 2012: Analisis kebijakan dan program Model Kawasan Rumah Pangan Lestari (M-KRPL). Bogor (ID).
- Saptana, KS I, Ashari, M M, WB K, Sabarella, Ngadiningsih, L F, M R, Nardi. 2019. Evaluasi independen program Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL). Bogor (ID).
- Saptana, Sunarsih, Friyatno S. 2013. Prospek Model-Kawasan Rumah Pangan Lestari (M-KRPL) dan replikasi pengembangan KRPL. *Forum Penelit Agro Ekon*. 31(1):67–87.
- Setiasih I, Suharno, Suryana A. 2020. Pengembangan kawasan jagung berbasis korporasi petani di Kabupaten Lebak, Banten. *Anal Kebijakan Pertan*. 18(2):89–103.
- Sirnowati E, Yulianti A, Ulpah B. 2015. Faktor-faktor yang memengaruhi keberhasilan kawasan rumah pangan lestari di Pulau Sumatera. *J Pengkaj dan Pengemb Teknol Pertan*. 18(11–27).
- Stufflebeam DL. 2003. The international handbook of educational evaluation (Chapter 2). Chapter 2. Stufflebeam DL, Kellaghan T, editors. Boston (MA): Springer Netherlands (NL).
- Sukanata I, Dukat, Yuniati A. 2015. Hubungan karakteristik dan motivasi petani dengan kinerja kelompok tani (Studi Kasus Desa Cisaat Kecamatan Dukupuntang). *J Agrijati*. 28(1):17–34.
- Suputra G, Adiputra I, Suardi I. 2016. Evaluasi dampak program Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL) pada Kelompok Wanita Tani (KWT) Tunas

- Sejahtera di Kecamatan Blahbatuh, Kabupaten Gianyar. *E-Jurnal Agribisnis dan Agrowisata*. 5(1):1–10.
- Syam D, Saputri N, Widyastuti A. 2018. Analisis added value program Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL) terhadap ekonomi rumah tangga (studi kasus pada Kelompok Wanita Tani “Dewi Sri” Kota Batu). *J Inov Ekon*. 3(2):73–82.
- Umam K, Sarifah I. 2018. Using the Context, Input, Process and Product (CIPP) model in the evaluation of training programs. *Int J Pedagog Teach Educ*. 2(19):183–194.
- Widayanti S. 2015. Evaluasi kinerja model kawasan rumah pangan lestari pada Balai Besar Pengkajian dan pengembangan teknologi pertanian melalui pendekatan balance scorecard. Institut Pertanian Bogor.
- Zhang G, Zeller N, Griffith R, Metcalf D, Williams J, Shea C, Misulis K. 2011. Using Context, Input, Proses, and Product Evaluation Model (CIPP) as a comprehensive framework to guidethe planning, implementation, and assessment of service learning program. *J High Outreach Engagem*. 15(4):57–83.